

PERAN GENERASI Z UNTUK BELA NEGARA SERTA PEMAHAMAN NILAI PANCASILA, DALAM BERBANGSA DAN BERNEGARA

THE ROLE OF GENERATION Z IN DEFENDING THE COUNTRY AND UNDERSTANDING THE VALUE OF PANCASILA FOR NATION AND STATE

Ivonne Kartika Permana

Program Studi D3 Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana peran Generasi Z untuk Bela Negara serta pemahaman akan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang baik sesuai yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena dengan kemajuan Teknologi, peran Generasi Z masih belum memahami arti Pancasila yang benar. Sebagai penerus bangsa harus terus diberikan ilmu pemahaman tentang Pancasila agar para generasi muda Indonesia tidak mudah terpengaruh dengan faham-faham yang dapat menyesatkan demi untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Kata Kunci: Generasi Z, UUD 1945, Bela Negara.

The purpose of this study was to determine the extent of the role of Generation Z for State Defense and understanding of the values of Pancasila as the basis of the Indonesian state in a good nation and state as stated in the 1945 Constitution, because of technological advances, Generation Z still do not understand the true meaning of Pancasila. As the nation's successor, we must continue to be given the knowledge of understanding Pancasila so that the younger generation of Indonesia is not easily influenced by ideas that can mislead for the sake of the Indonesian nation and state.

Keywords: Generation Z, 1945 Constitution, State Defense.

1. Latar Belakang Masalah

Bela Negara dianggap masih terlalu konseptual dan belum dipahami lebih luas oleh masyarakat. Khususnya generasi Z. Inovasi dan kreativitas baru sangat dapat diterima dan dipahami generasi Z, tentunya materi yang diberikan harus menarik dan tidak membosankan, jangan diartikan bela negara itu turun berperang tapi dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghindari tawuran, Narkoba. Generasi

Z umumnya saat ini harus diakui ada penurunan dari pada generasi kita terhadap bela negara, perlu ditingkatkan kembali dengan lebih kreatif dan sistematis, alasannya diantaranya muncul semangat kedaerahan yang berlebihan, separatism dan intoleransi agama yang berujung pada kebencian atara umat beragama serta kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah.

Ada 5 nilai tentang bela negara yang harus diketahui sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2019 yaitu :

1. Cinta Tanah Air
2. Sadar berbangsa dan bernegara
3. Setia kepada Pancasila
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5. Memiliki kemampuan bela negara

Kelima nilai inilah yang menjadi perwujudan Bela Negara kita sesuai dengan kemampuan dan profesi kita. Pemerintah dalam hal ini telah menyediakan panggung kepada generasi Z dan milenial melalui program komponen cadangan untuk membuktikan ketangguhan dan keandalan sebagai generasi penerus bangsa.

Komposisi penduduk Indonesia pada saat ini didominasi oleh generasi Z dan milenial. Jumlah penduduk generasi Z (yang lahir di rentang tahun 1997 – 2012) mencatat 74,93 juta jiwa atau 27,94 persen dari total populasi, sedangkan penduduk generasi milenial atau bisa juga disebut generasi Y (yang lahir antara tahun 1981 – 1996) mencapai 69,38 juta jiwa atau 25,87 persen dari total populasi. Dengan demikian kedua generasi tersebut merupakan sumber daya nasional yang sangat potensial.

Selama ini ada mata rantai yang putus antara generasi X dan generasi Z yang justru jumlahnya nomor 2 setelah generasi milenial. Generasi Z yang sebenarnya berpotensi akan *loss history* terhadap nilai-nilai Pancasila, karena mereka lebih banyak yang melakukan bercumbu dengan melalui dunia teknologi dan nilai-nilai yang terus mengalami perubahan secara drastis lebih cepat. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang

dengan kondisi masa lalu dimana kemajuan teknologi belum sedahsyat saat ini, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan dalam Pancasila dengan mudah diterima generasi pada masa tersebut.

Perubahannya sangat relative stabil pada masa lalu, prosesnya bukan revolutif tapi lebih ke evolutif, karena masa dulu hanya merasakan computer dengan teknologinya sederhana, yang kemudian berubah pelan-pelan, sampai kepada perubahan menjadi android dan lain-lain. Tantangan dalam dunia pendidikan bagaimana kita dapat memberikan pemahaman yang mudah diterima oleh para generasi Z ini, agar nilai-nilai Pancasila dapat tertanam kedalam jiwa nya sebagai generasi yang berbangsa dan bernegara

2. Generasi Z Diminta Melestarikan Nilai-Nilai Pancasila dengan Kreatifitas dan Karya

Generasi Z diminta terus melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merawat dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang tercantum dalam semboyan bahwa Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang bersatu serta berkembang dengan kemajuan. Dengan kemajuan teknologi yang tinggi saat ini Pancasila dapat dilakukan dengan cara berkarya dan berkreaitifitas memanfaatkan era digital sekarang ini. Perkembangan teknologi disertai dengan derasnya arus informasi memicu penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda patut mendapat perhatian yang serius, terutama bagi pemerintah. Bukan hanya dalam aspek

penerapan nilai-nilai Pancasila tetapi pengetahuan generasi muda terhadap aspek tekstual Pancasila juga perlu mendapat perhatian.

Pentingnya pemerintah memperhatikan pengetahuan generasi muda melalui survey yang dilakukan terhadap 990 responden yang berusia 17 hingga 20 tahun untuk mengetahui pemahaman generasi Z di Indonesia mengenai Pancasila dengan cara mereka diminta untuk menyebutkan teks Pancasila, kemudian menunjukkan masing-masing lambang sila-sila dalam Pancasila. Hasilnya tidak semua generasi Z yang mampu menyebutkan teks Pancasila dengan benar, dari hasil riset menemukan bahwa hanya 33,74 persen dari total generasi Z mampu menyebutkan teks dan menunjukkan lambang Pancasila dengan benar. Pentingnya merawat Ideologi Pancasila dalam keseharian belum secara kental memahami pengamalan nilai-nilai Pancasila, bahkan ada yang tidak tahu lambang-lambang Pancasila sehingga mereka tidak memahami makna yang sebenarnya isi dari Pancasila itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan media saat ini, semua orang dapat mengakses apapun, terlebih bagi para generasi milenial dan juga generasi Z. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penerapan Pancasila melalui media. Agar penerapannya lebih masuk pada generasi Z perlu dilakukan kampanye tentang Pancasila untuk dapat dipahami oleh para generasi muda apa yang sebenarnya manfaat dari Pancasila tersebut.

3. Penerapan Pancasila pada Generasi Z tentang Identitas Nasional

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa tersebut. Pendekatan demikian dapat menghindari dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoteric. Karena tidak ada satu bangsapun di dunia ini mutlak berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan antara bangsa satu dan bangsa yang lain.

Pada generasi Z Identitas Nasional sering dipermasalahkan dikarenakan ketidaktahuan apa arti dari identitas nasional itu sendiri, sehingga sering tidak bisa membedakannya. Banyak faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki yang berbeda-beda, faktor-faktor tersebut adalah keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan dan watak masyarakat. Pada generasi Z ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia dimana mereka tinggal.

Identitas nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam symbol-simbol kenegaraan. Adapun bila terjadi konflik social dan tawuran di kalangan masyarakat, sungguh tidak menggambarkan keseluruhan watak

bangsa Indonesia. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki oleh generasi Z, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah.

4. Bela Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Nasional

Bela negara dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 Ayat 3 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tersebut dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Ketahanan Nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkal pada generasi Z dalam suasana sekarang maupun nanti, sebab ancaman setelah berakhirnya perang dingin lebih banyak bergeser kearah nonfisik, antara lain ; budaya dan kebangsaan (Sudrajat, 1996: 1-2). Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran “mentalitas” bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai “musuh bersama”. (Arnawi, 2012:90). Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi sebagai konsepsi yang berlapis, atau Ketahanan Berlapis yaitu ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional (Basrie, 2002).

5. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara

Hingga saat ini Ketahanan Nasional kita mampu menghadapi dinamika kehidupan berbangsa sampai tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Diantaranya ancaman komunisme tahun 1965 dan yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997-1998. Namun demikian, kehidupan berbangsa juga mengalami dinamika yang terus menerus. Sehingga ketahanan nasional sebagai kondisi, akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau obyektif yang ada di masyarakat kita.

Ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin saling berkaitan dipengaruhi oleh delapan gatra sebagai unsurnya atau dikenal dengan nama “Ketahanan nasional berlandaskan ajaran asta gatra”. Kedelapan gatra ini juga digunakan sebagai tolok ukur di dalam menilai ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi.

Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks.

- Bela Negara Secara Fisik

Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih (Ratih), meskipun konsep Rakyat Terlatih (Ratih) adalah amanat dari Undang-undang No. 20 Tahun 1982. Rakyat Terlatih (Ratih) terdiri dari berbagai unsur, seperti Resimen Mahasiswa (Menwa), Perlawanan Rakyat (Wanra), Pertahanan Sipil (Hansip), Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer, dan lain-lain. Rakyat Terlatih mempunyai empat fungsi yaitu Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat. Tiga fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya

bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur Rakyat Terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sementara fungsi Perlawanan Rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana Rakyat Terlatih merupakan unsur bantuan tempur.

- Bela Negara Non Fisik

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa bela negara tidak selalu harus berarti “memanggul senjata menghadapi musuh” atau bela negara yang militeristik. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal (sekolah dan perguruan tinggi) dan jalur nonformal (sosial kemasyarakatan). Berdasar hal itu maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara nonfisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara: a) Mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan nonformal. b) Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. c) Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. d) Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. e) Berperan aktif dalam ikut

menanggulangi ancaman terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. f) Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. g) Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan.

- Makna Sikap Pancasila dalam konteks bela negara

Makna sikap dalam materi PKn adalah Sikap positif terhadap Pancasila. Mendukung nilai-nilai Pancasila serta berupaya melestarikan dan mempertahankannya. Nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat.

Sikap yang sesuai dengan Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah: Percaya dan takwa pada Tuhan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah: Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela

kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari seluruh umat manusia maka perlu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila ketiga, sikap yang sesuai dengan sila Persatuan Indonesia adalah: Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Sila keempat, sikap yang sesuai dengan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan adalah: Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah serta mempertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sila kelima, sikap yang sesuai nilai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah: Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan pada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan

hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

6. Penutup

Dari tulisan diatas bahwa pemahaman kana bela negara pada Generasi Z untuk pemahaman nilai Pancasila masih harus terus diberikan secara terus menerus agar dapat berkembang dengan berjalannya waktu untuk menciptakan manusia Indonesia yang mengerti arti berbangsa dan bernegara, Indonesia juga dengan situasi kondisi saat ini harus mengikuti perkembangan teknologi yang madani agar tidak salah dalam penerapannya, sehingga para generasi Z mampu memahami arti Pancasila yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Nugroho. Tanpa Tahun. “*HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA*”. (https://www.academia.edu/19526905/HAK_DAN_KEWAJIBAN_WARGA_NEGARA)
- Andrian, Putra. Tanpa Tahun. “*Hak dan Kewajiban Warga Negara*”. (https://www.academia.edu/33215958/Hak_dan_Kewajiban_Warga_Negara)
- Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Darmaputra, 1988, Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2016). *Dasar-Dasar Buku Ajar Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Handayani, Ria. 2015. *Hak dan Kewajiban Warga Negara*. Vol 3 No.5
- Imamah, Nur E. Tanpa Tahun. “*Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara*”. (<https://www.academia.edu/31760736/>).
- Kaelan; Zubaidi, Achmad, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* berdasar SK Dirjen Dikti No 43/DIKTI/KEP/2006, Paradigma, Yogyakarta
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung
- Yasin, Johan. 2015. *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga*

*Negara Dalam Hukum Positif
Indonesia. Vol 2 No. 1.*